

DUALISME PEMBINAAN PENGADILAN PAJAK

Oleh

Jordan Wisan, Nim 2014101046

Progam Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konflik norma antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang menghasilkan rumusan masalah mengenai (1) bagaimana dampak dualisme memengaruhi independensi konstitusional kekuasaan dalam pembinaan pengadilan pajak oleh Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung serta (2) mengetahui prinsip hirarki yang seharusnya dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, yakni melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-Undangan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan yaitu dengan mengkaji atau menganalisis peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945, dan Putusan MK No. 26/PUU-XXI 2023, serta peraturan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara normatif hukum bahwa pembinaan Pengadilan Pajak seharusnya mengikuti prinsip hierarki dalam peraturan perundang-undangan demi menjaga kepastian hukum (2) dualisme pembinaan Pengadilan Pajak oleh Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung menimbulkan dampak hukum yang merugikan wajib pajak yang berpekara, advokat yang menangani kasus pajak dalam pengadilan pajak, tatanan Hukum Tata negara, dan peneliti yang meneliti mengenai independensi kekuasaan yudikatif. Oleh karena itu, seharusnya dalam aspek pembinaan Pengadilan Pajak, baik teknisi peradilan maupun organisasi, administrasi, dan keuangan semua diberikan kepada Mahkamah Agung seperti yang berlaku pada lembaga peradilan lainnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI 2023.

Kata Kunci: Pengadilan Pajak, Pembinaan, Dualisme, Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung.

DUALISM IN THE DEVELOPMENT OF TAX COURTS

By

Jordan Wisan, NIM 2014101046

Law Department

ABSTRACT

This research aims to identify and analyze the normative conflicts between the 1945 Constitution and Article 5 paragraph (2) of Law Number 14 of 2002 concerning Tax Courts, resulting in the formulation of issues regarding (1) how dualism impacts the constitutional independence of power in the development of tax courts by the Ministry of Finance and the Supreme Court, and (2) determining the hierarchy principles that should apply in Article 5 paragraph (2) of Law Number 14 of 2002 concerning Tax Courts. The research method employed is normative legal research, utilizing legislative approaches, conceptual approaches, and analytical approaches. Legal sources include the 1945 Constitution, Legislation, and Constitutional Court Decisions. Data collection involves studying or analyzing legislation, the 1945 Constitution, and Constitutional Court Decision No. 26/PUU-XXI 2023, along with other relevant regulations. The results indicate that (1) normatively, the development of Tax Courts should follow the hierarchy principles in legislation to maintain legal certainty, and (2) the dualism in the development of Tax Courts by the Ministry of Finance and the Supreme Court has legal implications that adversely affect taxpayers involved in cases, lawyers handling tax cases in tax courts, the legal constitutional order, and researchers studying judicial power independence. Therefore, in the aspect of developing Tax Courts, both in terms of judicial and organizational, administrative, and financial aspects, all should be entrusted to the Supreme Court, as is the case with other judicial institutions, in accordance with Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI 2023

Keywords: *Tax Courts, Development, Dualism, Ministry of Finance and the Supreme Court.*